

Gerakan PAUD Sarolangun: Efektivitas Kebijakan Kolaboratif dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan

Agung Setiabudi¹, Septariani¹

¹ Universitas Islam Indragiri

² Pascasarjana, UIN STS Jambi

agung.setiabudi@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kolaboratif dalam meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sarolangun. Latar belakang studi ini berangkat dari tantangan pelaksanaan PAUD di daerah dalam kerangka desentralisasi, di mana disparitas mutu dan akses layanan masih terjadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap berbagai pemangku kepentingan PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif, seperti penguatan peran Pokja Bunda PAUD, pelaksanaan Gerakan Ayo ke PAUD, serta Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, ketersediaan layanan, dan kualitas proses pembelajaran. Namun, tantangan seperti keterlibatan desa yang belum optimal dan kualitas guru yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya kesinambungan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas tenaga pendidik sebagai kunci keberlanjutan kebijakan PAUD di daerah.

Kata Kunci: PAUD, kebijakan kolaboratif, mutu pendidikan, desentralisasi

Abstract English

This study aims to analyze the effectiveness of collaborative policies in improving access to and the quality of Early Childhood Education (ECE) services in Sarolangun Regency. The study is grounded in the challenges of ECE implementation in decentralized governance, where disparities in service access and quality persist. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies involving various ECE stakeholders. The findings indicate that collaborative strategies—such as strengthening the PAUD Task Force (Pokja Bunda PAUD), implementing the "Let's Go to PAUD" Movement, and promoting a Joyful Transition from PAUD to Primary School—have positively impacted community participation, service availability, and quality of learning processes. However, challenges remain, including limited village involvement and uneven teacher quality. The study concludes that sustained cross-sector coordination and teacher capacity development are critical to ensuring the long-term success of local ECE policies.

Keywords: ECE, collaborative policy, education quality, decentralization

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah masa depan suatu bangsa(Adhim & Hakim, 2019). Amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menempatkan pendidikan sebagai sarana utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Penegasan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yang tidak hanya menyatakan hak warga negara atas pendidikan, tetapi juga mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara merata dan bertanggung jawab atas pembiayaannya. Penguatan komitmen negara terhadap pendidikan tampak dalam kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD(Hartanto & Halim, 2024). Namun, amanat ini masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama dalam konteks desentralisasi pemerintahan yang menempatkan daerah sebagai pelaksana utama penyelenggaraan pendidikan.

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan pembiayaan, melainkan juga oleh pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan karakter(Salirawati, 2021). Pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli, memiliki peran esensial dalam mengasah perasaan, menumbuhkan kepekaan sosial, serta mempersiapkan generasi masa depan untuk menjadi insan yang beradab dan berdaya saing tinggi. Pendidikan bukan sekadar transmisi ilmu pengetahuan, melainkan juga proses peradaban yang menumbuhkan akhlak dan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan berbasis pada pemenuhan hak anak sejak usia dini(Halim et al., 2019).

Pembangunan nasional tanpa ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas adalah utopia. Realitas global menunjukkan bahwa negara-negara yang minim sumber daya alam, seperti Jepang dan Korea Selatan, mampu melesat menjadi negara maju melalui strategi investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan. Sebaliknya, negara dengan kekayaan alam yang melimpah namun gagal dalam pembangunan manusia cenderung terperangkap dalam krisis multidimensi(Halim & Fatoni, 2024). Fakta ini mengafirmasi bahwa pembangunan kualitas manusia harus menjadi prioritas strategis. Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut dimulai sejak tahap pendidikan anak usia dini (PAUD), yang menjadi fondasi utama terbentuknya karakter dan kompetensi anak dalam menghadapi pendidikan lanjutan.

PAUD memiliki kedudukan sentral dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi masa krusial pembentukan struktur dasar otak, kepribadian, dan kecerdasan sosial anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan tegas mengakui PAUD sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang wajib difasilitasi oleh negara. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaan PAUD di berbagai daerah masih jauh dari harapan. Tantangan nyata seperti minimnya tenaga pendidik profesional, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih membayangi efektivitas program PAUD(Halim & Mubarak, 2020). Perhatian terhadap PAUD tidak bisa lagi dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai urusan strategis nasional yang menentukan kualitas generasi mendatang.

Desentralisasi pemerintahan membawa konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik lokalitasnya. Konsekuensi ini memunculkan keragaman kualitas dan capaian pendidikan antarwilayah, bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah daerah masing-masing. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis memiliki peran penting dalam mengoperasionalkan kebijakan PAUD secara efektif dan merata. Namun kenyataannya, belum semua pemerintah daerah mampu memanfaatkan kewenangan tersebut secara optimal, terutama dalam memastikan bahwa setiap anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu(Sapina et al., 2022).

Kabupaten Sarolangun menjadi representasi nyata dari persoalan implementasi kebijakan PAUD dalam bingkai desentralisasi. Meskipun telah memiliki komitmen formal terhadap pengembangan PAUD, daerah ini masih menghadapi sejumlah hambatan krusial, mulai dari distribusi lembaga PAUD yang belum merata, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi PAUD, hingga lemahnya dukungan anggaran di beberapa kecamatan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sejak dini juga menjadi tantangan tersendiri(Rohani et al., 2021). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Urgensi untuk melakukan analisis terhadap kebijakan PAUD di daerah ini menjadi tidak terbantahkan. Kajian terhadap proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan PAUD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan serta potensi perbaikannya. Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting, melainkan juga untuk mendorong lahirnya kebijakan berbasis data dan kebutuhan lokal yang mampu meningkatkan mutu layanan PAUD secara berkelanjutan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pendidikan nasional melalui perbaikan di tingkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan(Nasution et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar hadir dalam praktik nyata.

LANDASAN TEORI

Kebijakan PAUD yang diterapkan di Kabupaten Sarolangun

Kajian teori terhadap kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sarolangun dapat ditelaah melalui perspektif kebijakan publik, pendidikan holistik-integratif, dan teori desentralisasi pendidikan(Munastiwi, 2019). Dalam ranah kebijakan publik, kebijakan PAUD di Sarolangun menampilkan karakteristik model kolaboratif, yakni sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya kerja sama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Tim Penggerak PKK melalui Bunda PAUD mencerminkan suatu bentuk governance

model yang mengedepankan partisipasi lintas sektor(Halim, 2021). Kebijakan seperti peluncuran Gerakan Ayo ke PAUD merupakan representasi dari strategi advokasi sosial yang tidak hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kebijakan pendidikan holistik-integratif yang melihat perkembangan anak usia dini sebagai satu kesatuan yang meliputi aspek kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pelaksanaan Gerakan Ayo ke PAUD yang disertai pemberian makanan tambahan bergizi memperlihatkan adanya integrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam menurunkan angka stunting sekaligus menjamin kesiapan belajar anak. Selanjutnya, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pengalaman belajar anak, sesuai dengan teori transisi pendidikan yang menekankan keberlanjutan pedagogis dan emosi. Dalam hal ini, pelarangan tes baca, tulis, hitung (calistung) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD menjadi bentuk nyata dari penolakan terhadap pendekatan akademik yang prematur, serta peneguhan paradigma bahwa fondasi pendidikan anak harus diletakkan pada penguatan karakter dan kesiapan sosial-emosional.

Kebijakan PAUD di Sarolangun juga dapat dianalisis dari perspektif desentralisasi pendidikan, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pendidikan sesuai konteks lokal. Dalam konteks ini, munculnya regulasi daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang PAUD Holistik-Integratif dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD mencerminkan bentuk konkret dari otonomi daerah dalam sektor pendidikan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum sekaligus instrumen perencanaan yang mengatur sinkronisasi program lintas sektor, penjaminan mutu, serta pencapaian hasil pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak(Halim, 2020).

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD menjadi penegasan lain bahwa kebijakan PAUD di Sarolangun tidak sekadar bersifat struktural dan administratif, tetapi juga mengandung aspek sosiokultural. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam peningkatan layanan PAUD menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini dipahami sebagai tanggung jawab bersama(Halim, 2022). Hal ini sejalan dengan pendekatan ekologi Bronfenbrenner yang menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.

Dari sisi implementasi dan kapasitas layanan, data kuantitatif mengenai jumlah satuan PAUD yang tersebar di berbagai kecamatan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk meningkatkan daya jangkau. Jumlah satuan PAUD yang bervariasi antara 30 hingga 75 lembaga per kecamatan, seperti yang dicatat di Kecamatan Sarolangun, memperlihatkan bahwa pemerintah daerah berusaha memfasilitasi akses seluas mungkin terhadap pendidikan usia dini. Namun demikian, jumlah satuan yang banyak tidak serta merta menjamin kualitas, sehingga intervensi programatik dan

kebijakan berbasis data menjadi sangat penting dalam menjaga standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun menunjukkan integrasi antara dimensi struktural (regulasi dan organisasi), substansial (kurikulum dan transisi belajar), serta kultural (partisipasi masyarakat)(Firdaus et al., 2023). Komposisi kebijakan yang demikian memperlihatkan arah pembangunan pendidikan anak usia dini yang komprehensif, berkelanjutan, dan kontekstual. Kajian ini memperlihatkan bahwa pengembangan PAUD tidak dapat dilepaskan dari struktur pemerintahan yang desentralistik, peran aktif masyarakat, serta pendekatan interdisipliner dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif(Amane et al., 2023) untuk menggambarkan dan memahami efektivitas kebijakan kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sarolangun. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada konteks, makna, dan dinamika implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor, serta dampaknya terhadap akses dan mutu layanan PAUD. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kebijakan PAUD yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang menjadi fokus karena memiliki kebijakan dan program PAUD yang cukup progresif seperti Gerakan Ayo ke PAUD dan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Subjek penelitian meliputi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan PAUD, antara lain pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bunda PAUD Kabupaten dan Kecamatan, Pokja Bunda PAUD, kepala dan guru satuan PAUD, kader PKK, tokoh masyarakat, serta orang tua peserta didik. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan penguasaan mereka terhadap isu PAUD di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi(Sarosa, 2021). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali pemahaman mereka terhadap peran, tantangan, serta strategi dalam pelaksanaan kebijakan PAUD. Observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebijakan seperti peluncuran program, sosialisasi, dan aktivitas di satuan PAUD. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen resmi seperti Peraturan Bupati, laporan program, data capaian, serta materi advokasi kebijakan sebagai bagian dari studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang bersifat administratif dan faktual.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk

menyaring informasi penting dari berbagai sumber, baik wawancara, observasi, maupun dokumen. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi deskriptif dan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam implementasi kebijakan. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyusun interpretasi secara reflektif dan terus-menerus diverifikasi melalui triangulasi data.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan, dokumen, dan observasi) serta teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, dilakukan konfirmasi kepada informan melalui teknik member check guna memverifikasi kebenaran temuan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki validitas yang kuat dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun pada tingkat satuan pendidikan telah mengalami kemajuan signifikan melalui berbagai strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pendidik, dan pelaksanaan program transisi yang ramah anak. Rakor dan pengukuhan Tim Pokja Bunda PAUD pada 17 Juni 2025 menjadi tonggak penting dalam koordinasi dan konsolidasi kebijakan PAUD, termasuk penyusunan target satu PAUD negeri per kecamatan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Di sisi lain, advokasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang melibatkan guru PAUD, guru SD, serta koordinator wilayah pendidikan menjadi upaya konkret dalam mewujudkan lingkungan transisi yang mendukung perkembangan anak(Feisal et al., 2023). Di tingkat masyarakat, keberhasilan sosialisasi Gerakan Ayo ke PAUD pada Desember 2024 yang berhasil menjangkau 100 anak penerima makanan tambahan bergizi menandakan adanya kemajuan partisipatif, meskipun tantangan dalam keterlibatan desa dan kesadaran orang tua masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Implementasi Kebijakan di Tingkat Satuan Pendidikan: Sinergi Kelembagaan dan Praktik Lapangan

Implementasi kebijakan PAUD di tingkat satuan pendidikan di Sarolangun mencerminkan pola top-down yang berhasil diterjemahkan secara operasional. Pengukuhan Tim Pokja Bunda PAUD tidak hanya simbolis, tetapi sekaligus berfungsi sebagai forum strategis dalam merumuskan kebutuhan nyata satuan pendidikan, seperti ketersediaan PAUD negeri dan fasilitas belajar yang layak. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang kuat dalam mendorong efektivitas pelaksanaan di lapangan. Selain itu, integrasi program Gerakan Transisi PAUD ke SD memperlihatkan proses transfer kebijakan ke dalam konteks kelas yang ramah anak, dengan meniadakan tekanan akademik berlebihan seperti tes calistung. Pendekatan ini memperlihatkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya proses transisi pendidikan yang menyenangkan sebagai fondasi pembelajaran jangka panjang.

Penguatan Kapasitas Guru dan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus

Aspek penting lainnya adalah peningkatan kapasitas pendidik yang diupayakan melalui kegiatan pelatihan, lomba kreativitas guru, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan PAUD tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga memperhatikan inklusivitas dan kualitas pengajaran. Implementasi Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 melalui ULD di tingkat lokal menjadi langkah nyata integrasi pendidikan inklusi sejak usia dini. Kegiatan bimbingan teknis bagi guru PAUD juga memperkuat kemampuan mereka dalam menangani keragaman kebutuhan peserta didik, menunjukkan upaya komprehensif dalam mewujudkan pendidikan yang setara bagi semua anak(Ruslan et al., 2023).

Implementasi di Tingkat Masyarakat: Capaian dan Tantangan

Meskipun terdapat kemajuan di tingkat satuan pendidikan, implementasi kebijakan PAUD di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam membangun kesadaran orang tua dan aparat desa terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Studi terdahulu dan data lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa belum optimal, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat PAUD. Namun demikian, keberhasilan program seperti Gerakan Ayo ke PAUD menunjukkan bahwa strategi berbasis aksi langsung (seperti pemberian makanan tambahan dan kegiatan sosialisasi) dapat meningkatkan partisipasi warga. Hal ini memperlihatkan bahwa program dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual lebih efektif dalam membangun dukungan masyarakat.

Implikasi terhadap Perumusan Strategi Kebijakan PAUD Berkelanjutan

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun sangat bergantung pada kesinambungan koordinasi antarlembaga yang terlibat, baik di tingkat pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Keterlibatan aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penggerak PKK melalui Bunda PAUD, serta koordinator wilayah pendidikan menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi. Namun, koordinasi ini perlu dijaga secara berkelanjutan, bukan hanya dalam momentum peluncuran program atau kegiatan seremonial, melainkan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara rutin. Pendekatan lintas sektor yang solid juga diperlukan untuk menyelaraskan berbagai aspek PAUD, seperti gizi, kesehatan, dan pengasuhan. Tanpa koordinasi yang konsisten dan terukur, pelaksanaan program PAUD berisiko menjadi fragmentaris dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik PAUD, merupakan aspek krusial dalam mendorong keberhasilan kebijakan. Kesenjangan kualitas pendidik yang masih ditemukan di beberapa kecamatan menjadi hambatan serius bagi penyediaan layanan PAUD yang setara dan berkualitas. Guru PAUD tidak hanya dituntut memiliki keterampilan pedagogis, tetapi juga kompetensi sosial-emosional untuk memahami perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Program

pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas seperti lomba kreativitas guru merupakan langkah positif, namun perlu dilaksanakan secara berkala dan terstruktur dengan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, pemerataan distribusi guru berkualitas, termasuk dukungan terhadap guru di daerah terpencil atau kurang berkembang, juga harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan. Tanpa investasi serius dalam penguatan kapasitas pendidik, maka kebijakan PAUD yang telah dirancang dengan baik akan sulit mencapai dampak optimal.

Di sisi lain, strategi pelibatan masyarakat, khususnya pada tingkat desa, menjadi salah satu titik lemah dalam implementasi kebijakan PAUD di Sarolangun yang harus segera diperbaiki. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD serta belum optimalnya partisipasi pemerintah desa menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini belum sepenuhnya menyentuh dimensi kultural masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi lintas sektor yang lebih intensif dan advokasi yang bersifat dialogis untuk mendorong perubahan paradigma tentang pendidikan anak usia dini di tingkat akar rumput. Kampanye publik, sosialisasi langsung, dan pemberdayaan tokoh lokal bisa menjadi jembatan untuk memperkuat pemahaman serta komitmen masyarakat terhadap PAUD. Penggabungan antara intervensi struktural—seperti regulasi dan pembiayaan—dengan pendekatan kultural yang menyentuh nilai-nilai lokal akan menjadikan kebijakan PAUD tidak hanya hadir sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mampu memberikan dampak menyeluruh dan berkelanjutan terhadap perkembangan anak usia dini di Sarolangun.

KESIMPULAN

Sebagai simpulan, kebijakan PAUD di Kabupaten Sarolangun mencerminkan upaya serius dan terkoordinasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini. Melalui inisiatif kolaboratif seperti “Gerakan Ayo ke PAUD” dan “Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan”, terlihat bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan menyentuh aspek kehidupan nyata masyarakat. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem PAUD yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan struktural dan kultural, yang menuntut perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan PAUD tidak dapat bertumpu pada aspek regulatif semata, melainkan harus didukung oleh strategi penguatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta pendekatan komunikasi yang kontekstual. Pemerintah daerah perlu menjadikan kebijakan PAUD sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, dengan fokus pada peningkatan kapasitas guru dan perluasan akses yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, keberlanjutan program sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat akar rumput yang merasa memiliki dan memahami pentingnya PAUD bagi

masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ke depan harus bersifat adaptif, berbasis bukti, dan dilaksanakan secara kolaboratif agar mampu menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam pembangunan anak usia dini di Sarolangun.

REFERENSI:

- Adhim, F., & Hakim, M. N. (2019). Perencanaan Strategi Berbasis Nilai di Lembaga Pendidikan Tinggi. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 259–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.314>
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 302–321. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A. (2020). *Konflik pendirian rumah ibadah & kearifan budaya lokal di Jambi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Halim, A. (2021). Penanganan Konflik Agama Di Kota Jambi Berbasis Kebijakan Publik. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 456–480. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.337>
- Halim, A. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter. In *Indopress*.
- Halim, A., Anwar, U. S. K., & Maisah, M. T. (2019). The Analysis of Character Education Policy at State of Madrasah Aliyah Jambi Indonesia.". *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 4(12), 888–891.
- Halim, A., & Fatoni, I. (2024). Transformasi Pendidikan Perempuan Melalui Hukum Islam Pendekatan Integratif Berbasis Nilai Islami. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 94–105.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i1.2022>
- Munastiwi, E. (2019). Manajemen Ekstrakurikuler Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 369–380. <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-09>
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR.2021.262321.1815>.
- Ruslan, I., Aqil Irham, M., & A. H. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 392–406. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Salirawati, D. (2021). Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah.

- Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 4(1), 17–27.
<https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p17-27>
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.14975>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.